

## **KINERJA KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMP AL-KHAIRAAT KALUMPANG KOTA TERNATE**

**Anwar Ismail**

*Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Khairun*

### **Abstract**

*The purpose are (1) to know the school committee to improve the quality of education at SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate; ( 2 ) to know the work achievement of school committee to improve the education quality at SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate. The approaches used in this research is a qualitative approach.*

*Research result indicates that ( 1 ) a school committee at SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate has formed by 2012 in accordance with the decree no. 325 / B-III / SMP.BP. Alkh / 11 / 2010 and has the school committee structure, namely; chief; secretaries, and the treasury; ( 2 ) the school committee meeting periodically, that is four times in a year. Involved in the talks is the principal, the teacher, student parents, Al-Khairaat foundation and the school committee. Things had been spoken in the meeting are; the school fee, standards graduation, the school programs plan ; ( 3 ) the school committee does not make a written report yet orally. This is a form of violations Kepmendiknas number 044 / u / 2002 about the school committee. ( 4 ) the school committee ' s active, this could influence the development of education at SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate. It is a part breach Kepmendiknas number 044 / u / 2002 about the school committee.*

*The keywords: performance, the quality, the school committee*

### **PENDAHULUAN**

Peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan formal dibutuhkan suatu Komite Sekolah yang akan memberikan sumbangsih pemikiran dan kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan. Selain itu diperlukan pula suatu perencanaan pendidikan yang akurat dan sistimatis terhadap perkembangan pendidikan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, melalui suatu wadah formal yang disebut dengan komite sekolah.

Di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 044/u/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur

pendidikan luar sekolah. Sedangkan Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.

Hubungan atau kerjasama antara sekolah dan masyarakat perlu ditingkatkan, dengan tujuan untuk mencapai tiga hal: (1) sekolah memiliki komunitas peserta didik yang berdomisili tidak terlalu jauh dari lokasi sekolah, sehingga terjadi proses rayonisasi berdasarkan domisili. Adanya rayonisasi fungsional akan menciptakan sinkronisasi antara kegiatan sekolah dengan kegiatan kemasyarakatan, (2) rayonisasi fungsional akan muncul kaitan emosional antara masyarakat dengan sekolah, dan (3) kaitan emosional dapat menggugah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya dan pemberdayaan pada khususnya.

Di dalam Pasal 188 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, peran serta masyarakat telah dirumuskan sebagai berikut. Masyarakat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai peran dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, (c) penggunaan hasil pendidikan, (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Cukup banyak dan beragam kemungkinan peran yang dapat ditunaikan oleh masyarakat dalam urusan pendidikan.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan komite sekolah di SMP Al-Khairaat Kalumpang, Kota Ternate berjalan dengan baik, namun pengurus dan anggota komite sekolah relatif belum aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni masih kurang dalam memberikan pertimbangan, masukan dan rekomendasi, mendukung, mengontrol serta masih kurang dalam menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Masih relatif kurang dalam melaksanakan fungsinya

yaitu masih rendah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kinerja sekolah, masih kurang dalam kerjasama dan evaluasi terhadap kinerja sekolah.

### **Apa itu Komite Sekolah?**

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansi kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepemendiknas nomor: 044/U/2002).

Sedangkan badan yang seperti Bp3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini. sedangkan di dalam PP no 17 tahun 2010 kedudukan ini tidak berubah, artinya bahwa Komite Sekolah tetap sebagai lembaga yang mandiri yang dibentuk guna mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perbedaannya dalam PP no 17 tahun 2010 ini disebutkan bahwa komite sekolah selain mandiri juga harus profesional. Artinya Komite sekolah harus benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsi, tidak hanya menjadi alat pelengkap di sekolah, atau bahkan hanya menjadi ”tukang stempel: atas kebijakan kepala sekolah.

### **Peran dan Fungsi Komite Sekolah**

#### **a. Peran Komite Sekolah**

Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002, komite sekolah berperan:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sedangkan dalam PP nomor 17 tahun 2010 pada pasal 205 fungsi pengawasan komite sekolah lebih dipertegas lagi.

Dalam pasal ini dijelaskan :

- a. Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- b. Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

#### **b. Fungsi Komite Sekolah**

Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dijelaskan bahwa Komite Sekolah berfungsi:

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
3. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
4. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
5. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Secara prinsip fungsi ini tidak berbeda dengan PP nomor 17 tahun 2010, artinya fungsi yang dijelaskan dalam PP ini masih relevan dilaksanakan. Hal yang berbeda dari PP ini adalah tentang keanggotaan komite sekolah. Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dijelaskan bahwa jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya adalah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya adalah gasal, sedangkan dalam PP nomor 17 tahun 2010 keanggotaan komite sekolah ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) orang.

Unsur-unsur yang dapat menjadi anggota komite sekolah juga berubah, Kepmendiknas nomor 044/U/2002 menjelaskan bahwa anggota komite sekolah dapat berasal dari unsur orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga pendidikan; wakil alumni; wakil peserta didik. Sedangkan dalam PP nomor 17 tahun 2010, keanggotaan komite Sekolah terdiri dari orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen); tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dengan demikian yang berubah adalah ditiadakannya anggota komite sekolah dari unsur alumni dan peserta didik.

Masa keanggotaan komite sekolah juga mengalami perubahan. Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002 setelah pembentukan pertama kali oleh sekolah, maka masa keanggotaan komite sekolah diatur berdasar anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) komite sekolah, sehingga dimungkinkan masa jabatan anggota komite sekolah bisa lebih dari tiga tahun. Dalam PP nomor 17 tahun 2010 pasal 197 ditegaskan bahwa keanggotaan komite sekolah adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali setelah satu kali masa jabatan.

### **Tujuan Pembentukan Komite Sekolah**

Tujuan dari pembentukan komite sekolah, yaitu:

1. Untuk menyalurkan dan mewartakan aspirasi masyarakat untuk melahirkan suatu kebijakan operasional serta program pendidikan dalam satuan pendidikan.

2. Untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Untuk menciptakan
4. Kondisi dan suasana yang transparan, demokratis dan akuntabilitas di dalam pelayanan dan juga penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik dan bermutu.

Sementara fungsi dari komite sekolah itu sendiri yakni:

1. Bekerja sama dengan semua pihak untuk menyelenggarakan mutu pendidikan yang berkualitas;
2. Untuk mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas;
3. Untuk menganalisa maupun menampung ide, aspirasi maupun berbagai keperluan pendidikan yang akan diajukan masyarakat.

Adapun beberapa hal yang diuraikan mengenai peranan komite sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah adalah:

1. Memperlancar penyelenggaraan suatu kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah, baik itu sarana maupun prasarana pendidikan
2. Melakukan pembinaan perilaku dan sikap siswa
3. Membantu siswa yang kurang mampu dengan mencarikan sumber pendanaan
4. Memberikan suatu penghargaan terhadap keberhasilan pengelolaan sekolah
5. Melakukan penilaian sekolah guna pengembangan dalam pelaksanaan kurikulum
6. Melakukan pembahasan mengenai usulan RAPBS
7. Meminta sekolah supaya mengadakan suatu rapat untuk keperluan tertentu menurut UU RI nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa komite sekolah terdiri atas unsur: orang tua siswa, wakil tokoh masyarakat (bisa ulama/rohaniwan, budayawan, pemuka adat, pakar atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat,

wakil dunia usaha dan industri, bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru – guru, dan kepala sekolah.

Tugas utama komite sekolah adalah membantu penyelenggaraan pendidikan sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite sekolah membantu penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah.

Peranan komite sekolah sendiri di dalam peningkatan mutu pendidikan tentunya perlu memperoleh dukungan dari semua komponen pendidikan termasuk kepala sekolah guru, siswa, wali murid, intitusi pendidikan maupun masyarakat dengan begitu perlu sebuah koordinasi dan kerjasama yang erat antara seluruh komponen pendidikan tersebut sampai usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian terdiri atas tiga, yaitu (a) data transkripsi wawancara, (b) data catatan lapangan, dan (c) data dokumen. Data transkripsi wawancara bersumber dari hasil wawancara dengan informan/subjek penelitian (komite sekolah, kepala sekolah dan guru) berkaitan dengan keaktifan kinerja dan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Data catatan lapangan bersumber dari hasil pengamatan/observasi di lapangan yang menyangkut deskripsi keadaan, ruang peralatan, para pelaku dan juga aktivitas sosial yang sedang berlangsung dan yang berhubungan dengan kinerja Komite Sekolah. Data dokumen bersumber dari tulisan (laporan kegiatan) Komite Sekolah.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan

analisis penelitian. Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dalam penelitian teknik maupun alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah) yang valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (nonstatistik) yaitu analisis data deskriptif artinya dari data yang diperoleh melalui penelitian tentang keaktifan kinerja Komite dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah akan dilaporkan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. Hal ini dilakukan karena penelitian ini tidak mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.

Menurut Nasution (1996) analisis data yang dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah yang masih bersifat umum, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian atau *display* data dan (3) pengambilan kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, dibahas berdasarkan data hasil penelitian. Pembahasan dimulai dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan komite sekolah.

### 1. Kepala Sekolah

Berdasarkan data yang diperoleh dengan cara mewawancarai kepala sekolah SMP Alhairaat Kalumpang Ternate. Kepala sekolah mengatakan bahwa struktur Komite Sekolah SMP Al-Khairaat telah dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan No: 325/B-III/SMP.BP. Alkh/11/2012. Struktur komite sekolah yaitu; ketua, sekretaris, bendahara dan anggota (6 orang). Anggota Komite Sekolah dibagi dalam enam (6) bidang dan memiliki tanggungjawab masing. Bidang-bidang itu adalah; bidang pemerhati pendidikan, bidang pengendali sumber dana, bidang pengendali mutu pendidikan, bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, dan bidang kerohanian. Komite Sekolah melakukan pertemuan secara berkalah, yaitu

empat (4) kali bersama dengan dewan guru, pihak yayasan dan orang tua siswa. Pertemuan itu membahas tentang hasil belajar siswa dan hal-hal lainnya. Komite Sekolah juga terlibat dalam pembahasan program sekolah bersama-sama dengan sekolah, yayasan dan orang tua siswa. Di dalam pekerjaannya, komite sekolah tidak memberikan laporan secara berkala dan tidak terlalu aktif dalam setiap kegiatan sekolah. Pihak sekolah akan berencana melakukan evaluasi kinerja komite sekolah secara menyeluruh bersama-sama dengan yayasan dan orang tua siswa secepatnya. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa komite sekolah SMP Al-Khairaat Kota Ternate secara struktural memang ada tetapi tidak terlalu aktif dalam kegiatan sekolah baik fisik maupun non fisik.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Komite Sekolah SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate belum terlalu aktif bekerja untuk peningkatan kualitas di sekolah. Ini dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah di atas.

## **2. Guru**

Di dalam data hasil wawancara dengan tiga guru SMP Al-Khairaat yang mewakili setiap kelas, yaitu kelas 1, 2 dan 3 tentang kinerja Komite Sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Mereka mengatakan informasi atau data yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Di mana mereka mengatakan bahwa komite sekolah telah terbentuk. Ada guru yang mengatakan bahwa komite sekolah aktif dalam kegiatan sekolah baik langsung maupun tidak langsung, tetapi belum terlalu maksimal bentuk partisipasinya. Maka dari itu, dia menyarankan bahwa dalam hal kinerja, komite sekolah harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya di masa yang akan datang, misalnya keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan program bersama sekolah, orangtua siswa dan yayasan sehingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah semakin maju di masa yang akan datang. Ada juga guru yang menyatakan bahwa di dalam perencanaan program sekolah, saya tidak tahu keterlibatan pihak komite sekolah. Dia tidak melihat laporan secara tertulis dari komite sekolah secara berkala. Secara keseluruhan dia menyampaikan bahwa peran komite sekolah belum aktif dalam pengembangan sekolah. Oleh karena itu, dia menyarankan kepada pihak

sekolah dan yayasan untuk mengevaluasi kinerja komite sekolah kedepannya. Sehingga komite sekolah lebih aktif dalam membuat program dan kegiatan yang dapat mengembangkan kualitas pendidikan di SMP Al-Khairaat. Hal ini juga dikatakan oleh guru yang lain mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai komite sekolah, mereka menjadi aktif tetapi belum maksimal, perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Harapannya adalah peran komite sekolah di sekolah lebih ditingkatkan lagi kinerjanya seperti membuat laporan tertulis secara berkala; bulanan atau mingguan. Sehingga bisa membantu sekolah meningkatkan kualitasnya di masa yang akan datang.

Dengan demikian secara formal komite sekolah telah ada di sekolah, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai komite sekolah belum terlalu maksimal. Jika hal ini terjadi maka akan dapat menghambat perkembangan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah.

### **3. Orang Tua Siswa**

Wawancara tentang hal yang sama juga dilakukan pada tiga orang tua siswa yang mewakili keterwakilan kelas 1, 2 dan 3. Mereka memberikan informasi tentang kinerja komite sekolah di SMP Al-Khairaat.

Dari ketiga guru yang telah diwawancarai telah memberikan informasi yang hampir sama. Mereka mengatakan bahwa komite sekolah telah terbentuk sejak lama. Komite mengadakan pertemuan empat kali dalam setahun, dalam pertemuan itu diikuti oleh pihak sekolah, yayasan dan kami sebagai orang tua siswa. Hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah menyangkut dengan uang SPP, uang komite, dan kegiatan sekolah lainnya. Tetapi dalam pelaksanaan tugas sebagai komite sekolah, mereka belum terlalu aktif dalam pengembangan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka (orang tua siswa) menyarankan akan kedepannya komite sekolah lebih aktif lagi dalam kegiatan sekolah sehingga sekolah dapat lebih maju.

### **4. Komite Sekolah**

Sesuai dengan hasil wawancara dengan tiga komite sekolah di SMP Al-Khairaat Kalumapang Ternate. Mereka memberikan informasi bahwa komite sekolah telah dibentuk dan memiliki struktur yang jelas. Struktur itu

terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Selama ini, kami telah melakukan tugas bersama dengan pihak sekolah. Melakukan pertemuan secara berkala yaitu 4 kali dalam setahun dan membahas tentang penentuan uang SPP, partisipasi bimbingan belajar bagi kelas IX, sosialisasi standar kelulusan dan pemabahasan penyusunan RKAS. Mereka melakukan kegiatan seperti disebutkan di atas, namun mereka tidak memberikan laporan secara tertulis, hanya memberikan laporan secara ke pihak sekolah dan yayasan.

Berdasarkan Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dijelaskan bahwa Komite Sekolah berfungsi:

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
3. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
4. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
5. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dari pembahasan yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa Komite Sekolah tidak menggunakan fungsi-fungsinya sebagai Komite Sekolah. Sehingga tugas dan perannya sebagai Komite Sekolah SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate tidak berjalan secara maksimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada data hasil dan pembahasan di atas yang berkaitan dengan keaktifan kinerja komite sekolah SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komite Sekolah SMP Al Khairat Kalumpang Ternate telah terbentuk pada tahun 2012 berdasarkan surat keputusan Surat Keputusan No: 325/B-III/SMP.BP. Alkh/11/2012 dan telah memiliki struktur komite sekolah, yaitu; ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
2. Komite sekolah mengadakan pertemuan secara berkala, yaitu empat kali dalam setahun. Yang terlibat dalam pertemuan itu adalah kepala sekolah, dewan guru, orang tua siswa, komite sekolah dan yayasan Al-Khairaat. Hal-hal yang dicarakan dalam pertemuan tersebut adalah; penentuan uang SPP, sosialisasi standar kelulusan, penyusunan program RKAS.
3. Komite sekolah tidak membuat laporan secara tertulis tetapi secara lisan. Ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tentang fungsi Komite Sekolah.
4. Kinerja Komite Sekolah belum terlalu aktif, hal ini dapat mempengaruhi perkemabangan kualitas perkembangan pendidikan di SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate. Ini juga merupakan bagian dari pelanggaran Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tentang fungsi Komite Sekolah.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Rineke Cipta.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. 1998. *Qualitative Research for Education*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah  
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan.  
UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.